

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari pulau Sabang sampai pulau Marauke, secara geografi luas daratan dan lautan lebih luas lautannya oleh karena itu daerahnya merupakan daerah perairan dan dikenal dengan negara maritim dan sebagian besar penduduknya yang tinggal dengan pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Disisi lain Negara Indonesia terkenal pula dengan negara agraris, hal itu dapat dilihat dari lahan pertanian yang luas dan sangat subur. Oleh sebab itu sebagian besar penduduknya pun menggantungkan hidup dan serta bermata pencaharian sebagai petani baik yang masih secara tradisional maupun secara modern.

Perkembangan Negara Indonesia bukan hanya dari aspek perekonomian maupun sosial budayanya saja melainkan dari aspek politik dan pemerintahannya juga mengalami banyak kemajuan. Salah satunya mengenai demokrasi yang menjadi idaman dari masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara dan masyarakat.

Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, akan tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. Demokrasi menghormati adanya perbedaan oleh karena itu demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga negara. Ketika kebinekaan itu terungkap, maka sistem demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah melalui jalan diskusi, persuasif, kompromi dan bukan pemaksaan kehendak ataupun dengan pameran kekuasaan.

Diskusi terbuka sebagai salah satu metode untuk mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi hak-hak sipil dan hak-hak politis seperti halnya kebebasan berbicara, dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri. Negara-negara demokrasi dapat diandalkan untuk melindungi hak-hak tersebut. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik. Selain itu demokrasi memungkinkan terjadinya pembauran kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokratis yang mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial.

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of live*) di dalam kehidupan bernegara. Sejak reformasi bergulir di negeri ini, atmosfer demokrasi berhembus kencang di segenap lapisan dan kehidupan masyarakat. Masyarakat pun menyambut “peradaban” baru itu dengan antusias. Kebebasan yang terpasung bertahun-tahun lamanya kembali berkibar di atas panggung kehidupan sosial. Meskipun demikian, atmosfer demokrasi itu tampaknya belum diimbangi dengan kematangan, kedewasaan, dan kearifan, sehingga kebebasan berubah menjadi “hukum rimba”. Mereka yang tidak sepaham dianggap sebagai “kerikil” demokrasi yang mesti disingkirkan.

Sebagai salah satu contoh paling nyata adalah maraknya berbagai aksi kekerasan yang menyertai perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu. Pihak yang kalah bertarung tidak mau menerima kekalahan dengan sikap lapang dada. Jika perlu, mereka memaksakan diri untuk melakukan tindakan anarkhi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin benih-benih demokrasi di negeri ini akan layu sebelum berkembang. Bagaimana mungkin nilai-nilai demokrasi bisa tumbuh dan berkembang secara kondusif kalau demokrasi dimaknai sebagai sikap besar kepala dan ingin menang sendiri. Bagaimana mungkin atmosfer demokrasi mampu menumbuhkan kedamaian, keadilan, dan ketenteraman kalau perbedaan pendapat ditabukan.

Adanya sikap yang tidak mau menerima kekalahan, mengekang pendapat orang lain, menyuarakan pendapat dengan unjuk rasa yang pada akhirnya berakhir dengan kerusuhan yang sampai berakibat korban jiwa dan materi, dan yang lebih ironis yang dilakukan para elit politik yang tidak memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi, yang tidak mau menerima suatu aspirasi yang berbeda yang berujung pada perkelahian. Hal-hal itu merupakan sebagian dari kejadian dinamika kehidupan bangsa ini.

Peristiwa dan fenomena tersebut adalah akibat dari kurangnya serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap urgensi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Diantara urgensi nilai-nilai demokrasi tersebut adalah (1) kebebasan untuk berpendapat, (2) kebebasan untuk membuat kelompok, (3) kebebasan untuk berpartisipasi, (4) kesetaraan antar warga, (5) saling percaya, (6) kerjasama. Akan tetapi mengingat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki rasio heterogenitas yang tinggi segala bentuk kebebasan tersebut haruslah dibarengi dengan batasan-batasan untuk saling menghormati. Hal yang paling urgensi seperti inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah saat ini guna meminimalisir kesalahfahaman dalam memahami nilai-nilai demokrasi yang seringkali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat.

Oleh karena itu bila dilihat dari perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini, masih terdapat kekurangan untuk mencapai demokrasi yang didasarkan pada kriteria ideal dari demokrasi yang sesungguhnya. Hal itu dapat terlihat dari kejadian-kejadian tentang sikap dari

sebagian kelompok yang mengedepankan pemaksaan kehendak demi menyuarkan aspirasinya, dengan anarkisme, mengganggu orang lain dan tidak mau menerima kekalahan kesemuanya itu dikarenakan kurangnya pemahaman tentang hakekat dari demokrasi yang sesungguhnya.

Sejalan dengan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, merupakan salah satu hal yang kurang baik apabila terus dilakukan bahkan apabila sampai dicontoh para generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut salah satu jalan adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan menentukan maju mundurnya suatu bangsa, karena pendidikan merupakan salah satu usaha pembangunan watak bangsa. Pendidikan ialah suatu usaha dari setiap diri manusia, bangsa dan negara sebagai upaya untuk meningkatkan intelektual (kecerdasan) manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan mencakup ruang lingkup yang luas, dengan tujuan membangun kepribadian manusia seutuhnya. Untuk membina kepribadian yang demikian, jelas memerlukan waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Oleh sebab itu, masalah pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masing-masing individu, keluarga, dan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan manusia agar mampu mandiri, mengembangkan potensi diri, menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna dan dapat hidup dalam pembangunan bangsa. Salah satu tuntutan mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini adalah

peningkatan mutu pendidikan. Hal ini timbul karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut maka sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai tugas dalam memenuhi harapan serta tujuan tersebut. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan generasi muda penerus bangsa yang berkemampuan, cerdas dan handal dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan berbangsa. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyatakan bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Memperhatikan isi dari UU No. 20 tahun 2003 tersebut, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dari bangsa itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka setiap pelaku pendidikan harus memahami tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan hubungan dengan-Nya, sebagai warga Negara yang ber Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dengan lingkungan, serta sehat jasmani dan rohani.

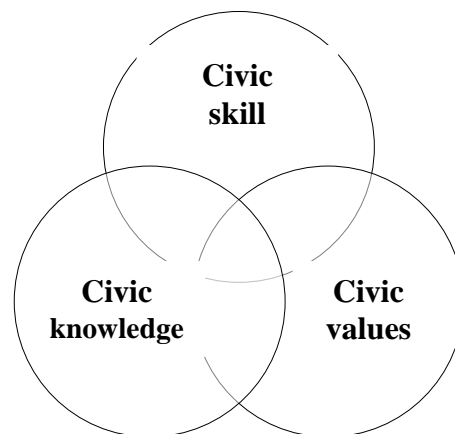
Sejalan dengan fungsi pendidikan nasional tersebut, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang berjenjang dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) serta perguruan tinggi (PT), bertujuan untuk membantu keluarga dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak atau siswa, agar menjadi manusia yang seutuhnya. Sekolah memiliki peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya sangat besar pada jiwa anak maka, disamping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentuk pribadi anak. Pembentukan pribadi menjadi manusia seutuhnya akan dapat diwujudkan jika siswa memperoleh kesempatan dalam pendidikan. Pengalaman itu sebagian diperoleh siswa secara langsung maupun tidak langsung melalui materi pelajaran sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), merupakan konsekuensi dari pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha sadar untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila. Usaha sadar ini dilaksanakan secara terarah dan terencana, yang dimanifestasikan dalam kurikulum sekolah-sekolah, dari

taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, melalui pendidikan formal.

Kajian atau titik sentrum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selalu berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka sebagaimana dapat digambarkan, kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah sebagai berikut :

Gambar 1 : Dimensi Materi Pendidikan Kewarganegaraan.



Sumber : Depdiknas, 2003: 2

Diagram di atas menggambarkan bahwa mata pelajaran PKn terdiri dari 3 dimensi, antara lain: Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, kebebasan individual, demokratis, toleransi, kebebasan

individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan perlindungan terhadap minoritas. Kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan kelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kedewasaan dan wawasan anak didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah). Kesadaran dan wawasan tersebut mencakup : (a) menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, (b) meningkatkan kualitas diri, (c) menyadari dan memiliki wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela Negara, (d) menghargai hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, (e) mengembangkan demokrasi, (f) memiliki tanggung jawab sosial, (g) mentaati hukum, (h) ketaatan membayar pajak, dan (i) sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengembangan demokrasi, merupakan salah satu dari kesembilan aspek kesadaran dan wawasan anak didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang terdapat dalam kajian dan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Maka oleh karena itu penanaman nilai-nilai demokrasi pada anak didik perlu diterapkan di dalam kehidupan

sehari-hari, agar anak didik sebagai generasi penerus bangsa mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila.

Tabel 1 : Hasil Observasi Dan Wawancara Pada Guru Bidang Studi PKn Dan Siswa, Yang Telah Dilaksanakan Pada SMP Negeri 1 Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Dalam Penelitian Pendahuluan.

No	Ciri Cerminan Penyimpangan Nilai-Nilai Demokrasi	Sikap dan Perilaku Siswa
1	Masih banyak siswa yang mendominasi dalam menyampaikan pendapat pada saat diskusi.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi
2.	Pada proses pembelajaran yang menggunakan metode diskusi masih banyak siswa yang tidak berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan diskusi, atau bersikap apatis.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi
3.	Dalam proses diskusi siswa cenderung tidak mau menerima saran dan kritik dari rekannya.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi
4.	Masih kurangnya sikap toleransi dan menghormati antar teman.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi
5.	Pada saat diskusi kelas berlangsung dan terjadi silang pendapat biasanya sampai berujung pada rasa ketidaksukaan antar teman.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi
6.	Selalu ingin menang sendiri, dan selalu ingin memaksakan pendapatnya kepada orang lain.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi
7.	Melakukan intimidasi terhadap orang lain dengan maksud supaya tujuannya tercapai.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi

Sumber Hasil Observasi Tanggal 3-11 Oktober 2011

Berdasarkan penelitian pendahuluan dan melalui observasi yang telah dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri I Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, diperoleh keterangan dan data bahwa diantara materi yang dipelajari di kelas VIII semester genap tahun pelajaran 2010/2011, materi

demokrasi adalah materi yang penerapannya sulit dilaksanakan oleh anak didik. Hal ini terbukti dari pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran, banyak siswa yang menampakkan gejala sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, seperti kasus yang terjadi diantaranya masih banyak siswa yang mendominasi pendapatnya saat diskusi, dan kurang memberikan kesempatan pada teman-temannya yang lain, pada proses pembelajaran di kelas yang menggunakan metode diskusi masih banyak siswa yang tidak berpartisipasi atau bersikap apatis.

Selain itu pada saat diskusi kelompok di depan kelas siswa cenderung tidak mau menerima saran dan kritik dari rekannya, hal ini terjadi pada saat presentasi di depan kelas apabila dalam diskusi tersebut ada yang menyanggah jawaban yang diberikan, maka diantara siswa yang memberikan jawaban bersikukuh bahwa jawaban yang diberikan kelompok mereka adalah yang paling benar, Pada saat diskusi kelas berlangsung dan terjadi silang pendapat biasanya sampai berujung pada rasa ketidaksukaan antar teman yang pada akhirnya mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok diantara mereka (geng), dan lebih ironisnya lagi sampai melakukan intimidasi terhadap siswa lain dengan maksud supaya tujuannya tercapai hal tersebut terjadi biasanya ketika pada saat pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS semua itu dilakukan demi memperoleh kemenangan dalam pemilihan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa SMP Negeri I Kelas VIII Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah memiliki perilaku yang kurang

mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu perlu adanya usaha yang nyata yang dapat secara efektif dan parktis dapat dilaksanakan sehingga penanaman nilai-nilai demokrasi kepada siswa dapat terlaksana sesuai dengan harapan sehingga hal-hal seperti yang di uraikan tersebut di atas dapat minimal diminimalisir bahkan dirubah lebih baik.

Materi demokrasi merupakan materi yang sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, suatu materi tersebut sebagai prasyarat untuk materi selanjutnya, misalnya materi demokrasi yang dipelajari pada tingkat SMP akan ditampilkan kembali pada tingkat SMA dalam materi sistem politik di Indonesia yang di dalamnya mencakup pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Jika materi demokrasi ini sudah dianggap sulit oleh siswa tanpa adanya penanggulangan, dikhawatirkan untuk materi yang berkaitan dengan materi tersebut sulit untuk dipahami dan diimplementasikan oleh siswa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap perlu adanya penelitian tentang permasalahan ini. Penelitian ini diharapkan akan dapat menemukan model yang tepat untuk dapat digunakan dalam proses pembelajaran PKn dalam penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri I Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang penanaman nilai-nilai demokrasi kepada siswa kelas VIII di SMP Negeri I Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan

uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah, sehingga dapat dirumuskan sejumlah pertanyaan peneliti yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam penanaman nilai-nilai demokrasi kepada siswa kelas VIII SMP Negeri I Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah?
- b) Model pembelajaran seperti apakah yang digunakan pendidikan kewarganegaraan dalam penanaman nilai-nilai demokrasi kepada siswa kelas VIII SMP Negeri I Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah?
- c) Nilai-nilai demokrasi apa saja yang akan ditanamkan kepada siswa kelas VIII di SMP Negeri I Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipilih dan dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam penanaman nilai-nilai demokrasi bagi siswa kelas VIII di SMP Negeri I Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga nantinya didapat informasi cara penanaman nilai-nilai demokrasi bagi siswa yang efektif dan dapat diterapkan serta dilaksanakan oleh guru di dalam proses pembelajaran melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat bermanfaat dan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak khususnya yang berprofesi dalam bidang pendidikan, antara lain:

A. Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang proses pendidikan kewarganegaraan dalam penanaman nilai-nilai demokrasi kepada siswa SMP yang efektif dan dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belajar siswa.

B. Secara Khusus

- 1) Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memperluas serta memperdalam wawasan dalam dinamika pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan masalah proses pendidikan kewarganegaraan dalam penanaman nilai-nilai demokrasi kepada siswa.
- 2) Bagi lembaga, program Studi PPKn Universitas Lampung, semoga dapat menjadi salah satu sebagai referensi bagi dosen dan mahasiswa untuk memahami dan melaksanakan penanaman nilai-nilai demokrasi.
- 3) Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk dapat merubah sikap siswa dalam hubungan sosial.
- 4) Bagi guru pada umumnya, sebagai salah satu referensi untuk memahami dan melaksanakan pembelajaran untuk menanamkan nilai-

nilai demokrasi kepada siswa SMP dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa.

- 5) Bagi siswa meningkatkan kemampuan memahami dan menjelaskan konsep dan nilai dalam materi Kewarganegaraan (ranah kognitif), meningkatkan kecerdasan emosional siswa (ranah afektif), meningkatkan keterampilan berwarganegara (ranah psikomotorik).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Ke-IPS-an

Proses pembelajaran yang diselenggarakan secara formal di sekolah dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan diri siswa secara terencana baik aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, seperti kurikulum ilmu sosial, tujuan utamanya adalah kajian yang berhubungan dengan pengembangan intelektual. Hal-hal yang kurang berhubungan dengan pengembangan intelektual menjadi sesuatu yang kurang penting. Marsh dalam Sujarwo (2011: 94) menyatakan kurikulum yang demikian sebagai “*Value-free approach*”. Dalam konteks ini, kiranya pernyataan Marsh berikut dapat memberikan suatu bahan pertimbangan pemikiran.

Marsh menyatakan bahwa: “*Over time the ‘structure’ of a discipline may be comprehended by students if they are taught in such away as to get inside the discipline to do history as a historian and to inquire as a sociologist; to think as an economist does and to observe and explain patterns in terms of processes like a geographer*”. (Marsh dalam Sujarwo, 2011: 94).

Dengan demikian tingkat kedisiplinan dan pemahaman siswa atau peserta didik di dalam kelas dapat pula mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar.

Pembelajaran Pendidikan IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” dari pada “transfer konsep”, karena dalam pembelajaran pendidikan IPS peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan IPS harus diformulasikannya pada aspek kependidikannya.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship transmission*, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya. Secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya

pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebermanfaatannya terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan nasional (Wiranataputra, 2004).

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan IPS dengan wilayah kajian pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship transmission*, yaitu dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur budaya warga negara secara berkesinambungan agar dapat menciptakan kecintaan kepada tanah airnya.